



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NIRWALA DWI HERYANTO
2. Jabatan : DIREKTUR KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA
3. NHK : 116244

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.498.570.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/122 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, Rp. 428.570.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/141 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/140 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 770.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 32.500.000
3. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
6. MOTOR, HONDA CB500X Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 634.570.270**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.083.260.084
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.986.900.354
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.986.900.354

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.